

## Nasionalisme dan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok: Implikasi bagi Kawasan Asia Tenggara

Savira Kamarani<sup>1</sup> Sri Sundari<sup>2</sup> Yanif Dwi Kuntjoro<sup>3</sup> Arya Dewa Nugroho<sup>4</sup>

Program Studi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan,  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya No.14, RT.3/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10430<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [saviraani@gmail.com](mailto:saviraani@gmail.com)<sup>1</sup> [sri.sundari@idu.ac.id](mailto:sri.sundari@idu.ac.id)<sup>2</sup> [yanifdkuntjoro@idu.ac.id](mailto:yanifdkuntjoro@idu.ac.id)<sup>3</sup>  
[aryanugroho724@gmail.com](mailto:aryanugroho724@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Tiongkok merupakan sebuah negara di Asia Timur yang memiliki peran strategis dalam dunia internasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya sikap nasionalisme yang tumbuh dari negara tersebut, sehingga berimplikasi kepada kebijakan luar negerinya. Tentu saja dominasi Tiongkok dengan kebijakan luar negeri yang berasaskan nasionalisme mempengaruhi kawasan yang berhubungan erat, salah satunya Asia Tenggara. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan mengulas lebih jauh kebijakan luar negeri Tiongkok dengan berlandaskan nasionalisme dan dampaknya terhadap kawasan Asia Tenggara. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literasi. Dari studi yang dilakukan dapat diketahui bahwa nasionalisme Tiongkok didefinisikan sebagai pandangan yang kuat tentang kebanggaan atas identitas Tiongkok dan kepentingan nasional, serta pengakuan terhadap kekuatan dan peran penting Tiongkok dalam dunia internasional. Penelitian ini menjelaskan sejarah perkembangan nasionalisme Tiongkok, prinsip-prinsip dasarnya, dan pengaruhnya pada politik, ekonomi, dan masyarakat Tiongkok. Selain itu, artikel ini juga membahas dampak dari nasionalisme Tiongkok pada hubungan bilateral Tiongkok dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

**Kata Kunci:** Nasionalisme, Kebijakan Luar Negeri, Tiongkok, Asia Tenggara.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Tiongkok merupakan sebuah negara dengan sejarah panjang yang kaya akan budaya, peradaban, dan keberagaman etnis. Nasionalisme telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam sejarah modern Tiongkok dan menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi politik, ekonomi, dan masyarakatnya.

Sejak revolusi komunis pada tahun 1949, Tiongkok dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). PKT telah memimpin Tiongkok melalui beberapa periode, termasuk era Mao Zedong yang ditandai dengan Gerakan Kebudayaan dan Revolusi Kebudayaan, dan periode reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1978 di bawah pimpinan Deng Xiaoping (Gani, 2014). Sejak reformasi ekonomi tersebut, Tiongkok telah menjadi kekuatan ekonomi global yang sangat penting, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan sejumlah besar perusahaan multinasional.

Paham nasionalisme di Tiongkok merupakan sebuah ideologi yang memiliki dasar-dasar pemikiran tentang kebanggaan atas identitas Tiongkok yang kuat, termasuk sejarah, budaya, dan kedaulatan teritorial. Nasionalisme Tiongkok didasarkan pada pandangan bahwa Tiongkok adalah bangsa yang besar dan kuat, dan bahwa kepentingan nasional Tiongkok harus diletakkan di atas segalanya (Prasetyo, 2017).

Nasionalisme Tiongkok sering diidentikkan dengan prinsip-prinsip seperti 'Tiongkok Satu' (One China) dan 'Kesatuan Nasional' (National Unity) (Murniati & Lestari, 2020). Prinsip

'Tiongkok Satu' menyatakan bahwa Taiwan, Hong Kong, dan Macau adalah bagian dari Tiongkok, dan bahwa kedaulatan Tiongkok harus dihormati oleh negara-negara lain. Prinsip 'Kesatuan Nasional' menyatakan bahwa semua kelompok etnis di Tiongkok harus bersatu dan saling mendukung, sehingga negara dapat menjadi lebih kuat dan stabil.

Nasionalisme Tiongkok juga menekankan pentingnya kekuatan militer dan keamanan nasional. Tiongkok telah meningkatkan investasi dalam pertahanan militer dan modernisasi Angkatan Bersenjata, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat posisi di dunia internasional. Hal ini juga mencerminkan pandangan nasionalis bahwa Tiongkok harus menjadi kekuatan dunia yang dominan dan memimpin Asia (Yuniawan, 2019). Dalam aspek ekonominya, Tiongkok berfokus pada kemajuan ekonomi dan perdagangan internasional. Tiongkok telah mengadopsi strategi diplomasi ekonomi yang agresif, dengan tujuan mempromosikan kepentingan ekonomi nasional Tiongkok dan meningkatkan pengaruh global negara tersebut (Arifianto, 2017). Dan dalam elemen budaya, Tiongkok menekankan pada bahasa dan budaya sebagai simbol kekuatan nasional. Hal ini mencakup promosi bahasa Mandarin, budaya populer Tiongkok, dan kegiatan akademis dan budaya lainnya (Zhao, 2020).

Secara garis besar, nasionalisme Tiongkok adalah sebuah pandangan yang kuat tentang kebanggaan atas identitas Tiongkok dan kepentingan nasional, serta pengakuan terhadap kekuatan dan peran penting Tiongkok dalam dunia internasional. Selain itu paham nasionalisme Tiongkok tercermin dengan pengaruh kuat Kebijakan luar negeri Tiongkok dari dalam upaya untuk memperkuat posisi Tiongkok di panggung global dan meningkatkan pengaruhnya di wilayah Asia, terutama di Asia Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literasi. Metode penelitian studi literasi (literature review) merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah atau review terhadap kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari studi literasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik penelitian dan memahami gap atau kekosongan pengetahuan yang masih ada dalam bidang penelitian yang relevan (Hart, 2018).

Penulis mengumpulkan berbagai artikel baik nasional maupun internasional yang membahas secara jelas dan rinci mengenai peran Tiongkok di dunia internasional. Penulis berfokus pada nasionalisme di Tiongkok dan kebijakan luar negeri Tiongkok yang berpengaruh pada stabilitas negara lain yang berhubungan, baik secara bilateral maupun regional.

## **PEMBAHASAN**

### **Dinamika Nasionalisme Tiongkok**

Nasionalisme merupakan elemen kunci dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, yang sangat berdampak pada kawasan Asia Tenggara. Kebijakan nasionalis Tiongkok yang menekankan pentingnya kepentingan nasional dan integritas wilayahnya telah memicu konflik dengan negara-negara di kawasan yang memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih (Fadhilah, 2017).

Nasionalisme Tiongkok bermula pada awal abad ke-20 ketika Tiongkok masih menjadi negara yang lemah dan terpecah-belah akibat dari kekuasaan kolonialisme dan imperialisme. Gerakan nasionalis Tiongkok didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Tiongkok sebagai negara yang kuat dan independent (Smith, 2019).

Salah satu tokoh yang memperjuangkan nasionalisme Tiongkok adalah Sun Yat-sen, seorang pemimpin politik dan revolusioner Tiongkok yang mendirikan Kuomintang (KMT)

atau Partai Nasionalis pada tahun 1912. Ia memimpin gerakan untuk menggulingkan dinasti Qing dan memproklamasikan Republik Tiongkok pada tahun yang sama (Zarrow, 2023). Namun, pasca proklamasi kemerdekaan Tiongkok, Sun Yat-sen menghadapi banyak kendala dalam upayanya membangun negara yang kuat dan independen. Pada masa itu, Tiongkok masih menjadi target pengaruh kolonialisme dan imperialisme dari negara-negara Barat dan Jepang. Selain itu, konflik internal antara faksi-faksi politik juga menghambat kemajuan nasionalisme Tiongkok (Frazier, 2018).

Pada masa Perang Dunia II, Jepang berhasil menduduki sebagian besar wilayah Tiongkok. Perjuangan melawan penjajah Jepang ini memperkuat semangat nasionalisme Tiongkok dan mempersatukan faksi-faksi politik untuk melawan invasi Jepang. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Tiongkok mengalami konflik antara KMT yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang dipimpin oleh Mao Zedong. Setelah beberapa tahun perang saudara, PKT berhasil memenangkan pertempuran dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 (Westad, 2017).

Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, nasionalisme Tiongkok berkembang dengan baik. Pemerintah Tiongkok memperjuangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Tiongkok juga memperkuat posisinya di kancah internasional dan berusaha membangun hubungan dengan negara-negara lain (Sautman & Hairong, 2018).

Meskipun Tiongkok telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam memperkuat nasionalisme, masih ada tantangan dan kendala yang harus diatasi, seperti ketegangan dengan negara-negara tetangga dan kritik dari masyarakat internasional atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan-kebijakan otoriter yang diambil oleh pemerintah Tiongkok. Selain itu, nasionalisme Tiongkok juga menjadi semakin kompleks dan bercabang karena pengaruh budaya dan sejarah yang berbeda-beda di berbagai wilayah di Tiongkok. Hal ini terlihat dalam konflik yang terjadi di Tibet dan Xinjiang, di mana masyarakat setempat merasa bahwa kebijakan pemerintah Tiongkok tidak menghormati hak-hak mereka sebagai minoritas.

Di era modern, nasionalisme Tiongkok semakin dipengaruhi oleh pengaruh teknologi dan media sosial (Sari & Astuti, 2018). Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di Tiongkok, masyarakat Tiongkok menjadi semakin terhubung dan mudah terpapar dengan berbagai ideologi dan pandangan politik, termasuk nasionalisme. Beberapa tindakan pemerintah Tiongkok dalam menjaga nasionalisme antara lain adalah melalui pendidikan dan media. Pemerintah Tiongkok mendorong pengajaran sejarah dan kebudayaan Tiongkok di sekolah-sekolah dan universitas, serta membatasi akses ke media asing untuk mengendalikan narasi dan mempromosikan nilai-nilai nasionalisme.

Secara keseluruhan, nasionalisme Tiongkok telah memainkan peran penting dalam sejarah Tiongkok dan terus menjadi kekuatan penting dalam politik dan budaya Tiongkok saat ini. Meskipun demikian, tantangan dan konflik yang dihadapi oleh nasionalisme Tiongkok menunjukkan bahwa terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun dan mempertahankan nasionalisme yang kuat dan inklusif di Tiongkok.

### **Kebijakan Luar Negeri Tiongkok**

Kebijakan luar negeri Tiongkok dalam ilmu hubungan internasional telah mengalami banyak perubahan sejak pendirian Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Dalam awal pembentukan negara tersebut, Tiongkok mengambil kebijakan luar negeri yang lebih tertutup dan mengejar kebijakan isolasi, di mana Tiongkok tidak terlalu aktif dalam urusan internasional.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan situasi internasional, kebijakan luar negeri Tiongkok telah mengalami perubahan yang signifikan. Tiongkok telah memperkuat perannya di bidang ekonomi global. Dan sejak akhir 1970-an, Tiongkok telah melakukan reformasi ekonomi dan membuka diri terhadap dunia luar. Sejak itu, Tiongkok telah menjadi salah satu negara terbesar dalam hal perdagangan internasional dan telah memainkan peran penting dalam hubungan internasional (Sari, 2019). Kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini mencakup berbagai bidang, termasuk diplomasi ekonomi, keamanan nasional, dan kebijakan serta isu internasional.

Kebijakan luar negeri Tiongkok memiliki beberapa tujuan, yang pertama adalah meningkatkan pengaruh global. Tiongkok memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan besar di dunia dengan pengaruh yang lebih besar terutama dalam dominasi ekonomi secara global. Untuk mencapai tujuan ini, Tiongkok telah meluncurkan inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan mendirikan bank pembangunan multilateral baru, yaitu Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (Chen, 2021). Kemudian meningkatkan keamanan nasional terutama dalam hal menjaga integritas wilayahnya, mengelola sumber daya alamnya, dan melindungi kepentingan ekonominya. Oleh karena itu, Tiongkok terus memperkuat kekuatan militer dan melakukan klaim kedaulatan di Laut China Selatan (Martinson & Yamamoto, 2021). Untuk meningkatkan posisi Tiongkok sebagai pemimpin global dalam isu-isu internasional, Tiongkok ingin menjadi pemimpin dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan pengembangan teknologi. Tiongkok telah memainkan peran yang semakin aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Sari & Ramadhan, 2021).

Dalam sejarahnya, kebijakan luar negeri Tiongkok telah mengalami banyak perubahan, dari awal yang tertutup dan mengisolasi diri hingga menjadi negara yang aktif dalam urusan internasional. Saat ini, kebijakan luar negeri Tiongkok mencakup berbagai bidang, termasuk diplomasi ekonomi, keamanan nasional, dan isu-isu internasional. Tujuan utama dari kebijakan luar negeri Tiongkok adalah meningkatkan pengaruh global, memperkuat keamanan nasional, dan memperjuangkan posisi sebagai pemimpin global dalam isu-isu internasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, Tiongkok telah meluncurkan inisiatif seperti BRI dan mendirikan bank pembangunan multilateral baru, yaitu AIIB. Tiongkok juga terus memperkuat kekuatan militernya dan memainkan peran yang semakin aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan WHO.

### **Implikasi Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Asia Tenggara**

Kebijakan luar negeri Tiongkok memiliki implikasi yang signifikan di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ekonomi, Tiongkok adalah negara terbesar di Asia dan menjadi motor penggerak ekonomi regional. Dengan inisiatif BRI dan AIIB, Tiongkok telah melakukan investasi besar-besaran di banyak negara di kawasan Asia, yang memiliki potensi untuk meningkatkan koneksi infrastruktur dan perdagangan antar negara di kawasan tersebut. Namun, ada keprihatinan bahwa investasi ini juga dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dan memperkuat pengaruhnya di kawasan.

Tiongkok juga telah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan melalui forum-forum regional seperti ASEAN-China Free Trade Area dan kerja sama ekonomi regional melalui RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) (Hidayati, 2020). Namun, upaya Tiongkok untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang ambisi hegemonik Tiongkok di kawasan tersebut.

Kebijakan luar negeri yang didukung oleh sikap nasionalisme telah menimbulkan konflik tersendiri di Kawasan Asia Tenggara. Tiongkok memiliki klaim kedaulatan di sebagian

besar wilayah Laut China Selatan, yang telah menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangganya di kawasan. Kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin agresif dalam menegakkan klaim wilayahnya, terutama dengan membangun pulau buatan dan menginstalasi instalasi militer di wilayah sengketa, telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut (Sari, 2020).

Selain itu, peran Tiongkok dalam isu-isu internasional juga memiliki implikasi di Asia Tenggara. Sebagai pemimpin dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan pengembangan teknologi, Tiongkok memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan global. Namun, ada keprihatinan bahwa kebijakan Tiongkok dalam isu-isu ini mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Wahid, 2018).

Kebijakan luar negeri Tiongkok memiliki dampak yang signifikan dan dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di Kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara di kawasan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Tiongkok dan menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif.

Implikasi dari kebijakan nasionalis Tiongkok ini adalah meningkatnya ketegangan di kawasan. Tiongkok telah melakukan klaim atas sebagian besar Laut China Selatan, yang bertentangan dengan klaim yang dibuat oleh negara-negara tetangganya di kawasan. Hal ini telah memicu sengketa wilayah dan meningkatkan ketegangan di kawasan. Selain itu, kebijakan luar negeri nasionalis Tiongkok juga telah memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara. Dengan memperkuat kekuatan militer dan ekonominya, Tiongkok telah memperoleh pengaruh yang lebih besar di kawasan dan dapat mempengaruhi kebijakan negara-negara tetangganya. Namun, ada juga keprihatinan bahwa kebijakan nasionalis Tiongkok dapat memperburuk ketegangan dan mengancam stabilitas kawasan. Negara-negara di kawasan perlu menjaga keseimbangan antara menjaga integritas wilayah dan menyelesaikan perbedaan mereka dengan Tiongkok secara damai.

## KESIMPULAN

Nasionalisme Tiongkok adalah elemen kunci dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, yang berdampak signifikan pada kawasan Asia Tenggara. Gerakan nasionalis Tiongkok bermula pada awal abad ke-20 dan didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Tiongkok sebagai negara yang kuat dan independent. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, nasionalisme Tiongkok berkembang dengan baik, dan pemerintah Tiongkok memperjuangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta membangun hubungan dengan negara-negara lain. Di era modern, nasionalisme Tiongkok semakin dipengaruhi oleh pengaruh teknologi dan media sosial. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di Tiongkok, masyarakat Tiongkok menjadi semakin terhubung dan mudah terpapar dengan berbagai ideologi dan pandangan politik, termasuk nasionalisme.

Selanjutnya nasionalisme Tiongkok juga telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok. Kebijakan luar negeri Tiongkok bertujuan untuk meningkatkan pengaruh global, meningkatkan keamanan nasional, dan menjadi pemimpin global dalam isu-isu internasional. Ini dilakukan melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), peningkatan kekuatan militer dan klaim kedaulatan di Laut China Selatan, serta memainkan peran yang aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan WHO.

Meskipun Tiongkok telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam memperkuat nasionalisme, masih ada tantangan dan kendala yang harus diatasi. Kebijakan luar negeri

Tiongkok yang didorong oleh nasionalisme juga memiliki implikasi bagi kawasan Asia Tenggara. Tiongkok memiliki klaim wilayah yang juga diklaim oleh negara-negara lain di kawasan, seperti Laut China Selatan. Hal ini dapat memicu konflik dan meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dengan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, penting bagi Tiongkok untuk mempertimbangkan implikasi kebijakan luar negeri mereka terhadap stabilitas dan keamanan regional. Di sisi lain, negara-negara tetangga Tiongkok juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan Tiongkok dan mencari cara untuk menyelesaikan sengketa tanpa mengorbankan kepentingan nasional mereka. Dengan cara ini, negara-negara di kawasan dapat mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara secara bersama-sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, R. (2017). Ekonomi Politik Tiongkok di Era Xi Jinping. *Jurnal Global & Strategis*, 11(1), 1-16.
- Barry Sautman and Yan Hairong. (2017). "The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy," *Journal of Contemporary Asia* 47, no. 3, 369-393.
- Chen, S. (2021). Belt and Road Initiative and China's Impact on Central Asia: Energy, Geopolitics and the New Silk Road. *Eurasian Geography and Economics*, 62(1), 1-17.
- Fadhilah, S. (2017). Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dan Dampaknya terhadap Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 98-110.
- Frazier, Mark W. (2018) "The resilience of Chinese nationalism in a globalizing world." *Journal of Contemporary China* 27, no. 111, 1-14.
- Gani, H. (2014). "Konsolidasi Kekuasaan Partai Komunis Tiongkok Pasca Revolusi Kebudayaan: Sebuah Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 1-12.
- Graeme Smith. (2019, October 14). China's Unstoppable Nationalism. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2019/10/14/china-unstoppable-nationalism-xi-jinping/>
- Hart, C. (2018). *Doing a literature review: Releasing the research imagination*. Sage Publications.
- Hidayati, R. (2020). Potensi dan Tantangan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bagi Indonesia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 9(2), 172-183.
- Martinson, R. D., & Yamamoto, K. (2021). China's Maritime Security Strategy: Drivers, Objectives, and Implications. *International Security*, 46(2), 145-184.
- Murniati, A., & Lestari, I. P. (2020). "Dampak Kebijakan One China Policy Terhadap Hubungan Taiwan-China". *Jurnal Global & Strategis*, 14(2), 147-160.
- Prasetyo, Y. A. (2017). "Pengaruh Paham Nasionalisme Tiongkok dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan". *Jurnal Global & Strategis*, 11(1), 1-13.
- Sari, D. A. (2019). Transformasi Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Era Reformasi Ekonomi: Studi Kasus Investasi Langsung Asing. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 15(1), 1-12.
- Sari, D. A. (2020). Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dan Dampaknya terhadap Ketegangan di Laut China Selatan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 57-74.
- Sari, I. A. P., & Astuti, R. D. (2018). Media Sosial dan Pembentukan Identitas Nasionalisme Tiongkok. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 11(1), 10-22.
- Sari, R. P., & Ramadhan, M. (2021). Strategi Tiongkok dalam Memperkuat Peran sebagai Pemain Utama di Perdagangan Internasional. *Jurnal Diplomasi*, 5(2), 165-176.
- Wahid, A. (2018). Kepentingan Nasional Tiongkok dalam Perspektif Hubungan Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(2), 59-72.
- Westad, Odd Arne. (2017) *The Cold War: A World History*. New York: Basic Books.

- Yuniawan, A. (2019). "Modernisasi Militer China dan Strategi Kebijakan Luar Negeri Cina: Studi Kasus di Asia Tenggara". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 127-142.
- Zarrow, Peter. "Sun Yat-sen." *Encyclopædia Britannica*. Encyclopædia Britannica, Inc., n.d. Web. 04 March 2023.
- Zhao, S. (2020). Chinese cultural diplomacy in Southeast Asia: A study of the Confucius Institutes. *The Pacific Review*, 33(2), 240-263.